

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun terakhir banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada tatanan global yang tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional maupun regional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi pada berbagai sektor unggulan yang dapat dioptimalkan melalui pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan usaha yang meliputi perubahan berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi dibentuk melalui suatu proses perencanaan pembangunan dengan cara sistematis dan juga berkesinambungan oleh pemerintah disetiap kabupaten/kota, Provinsi, maupun pusat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan perkembangan suatu daerah (Harjito dan Martono, 2008). Proses tersebut tentunya tidak lepas dari peran masyarakat dengan menjalankan pendekatan *Bottom Up* agar pembangunan yang dijalankan tepat sasaran dan mencapai hasil yang optimal. Pembangunan ekonomi dapat diartikan juga sebagai suatu proses perkembangan tingkat ekonomi guna meningkatkan kualitas atau hidup dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya dan potensi sektornya masing-masing, maka dalam aktualisasi pembangunan suatu daerah tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Selain itu, suatu daerah juga memiliki karakteristik yang beragam menyelaraskan dengan kebutuhan daerah seperti letak geografis,

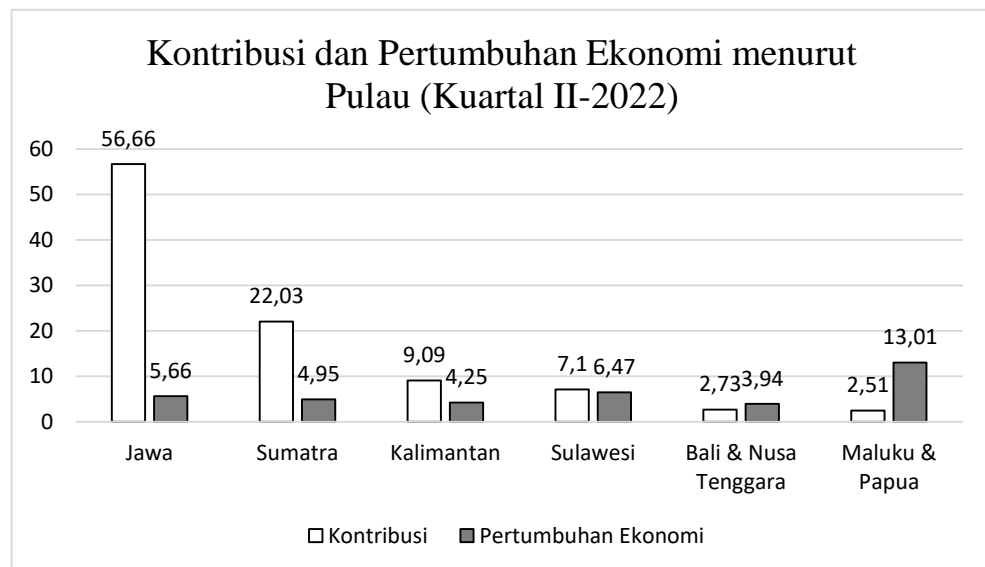
budaya yang ada, serta status sosial penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan daerah yang tepat guna memperkuat sektor ekonomi yang berpeluang tinggi melalui pengembangan, peningkatan, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal tersebut akan membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ada dengan terbukanya lapangan kerja baru, bertambahnya proses menghasilkan barang dan jasa yang akan meningkatkan penghasilan per kapita bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan pada suatu perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meliputi peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator dalam menelusuri daerah-daerah dengan tingkat perekonomian yang cenderung meningkat dan dapat menciptakan banyak kesempatan kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tanpa melibatkan tingkat pertumbuhan penduduk dan tidak juga memandang apakah terdapat perubahan struktur ekonomi. Sedangkan laju perekonomian secara keseluruhan dihitung rata-rata dari tingkat pertumbuhan sektoral daerah yang tercatat pada Produk Domestik Bruto. Indikator PDRB diperoleh melalui pendapatan tiap tiap unit yang ada dalam perekonomian, kenaikan barang dan jasa setiap tahun yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi (Dewi dan Yasa, 2018). Dapat diartikan apabila suatu sektor berkontribusi besar namun pertumbuhannya lambat, maka akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah, sebaliknya apabila suatu sektor berkontribusi besar dan

tingkat pertumbuhannya tinggi, maka akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Aktivitas ekonomi di Indonesia masih terpusat pada Pulau Jawa karena tingkat kemajuan pembangunannya dinilai paling tinggi dan memberikan sumbangan PDB terbesar, hal ini dikarenakan wilayah Pulau Jawa kaya akan sumber daya alam, luasnya pasar domestik, angkatan kerja usia produktif yang berpendidikan, dipadukan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Gambar 1. 1 Kontribusi PDB dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pulau (Kuartal II-2022)



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan grafik di atas menyatakan bahwa nilai perekonomian Indonesia pada kuartal atau triwulan II-2022 didominasi oleh Provinsi di Pulau Jawa dengan nilai kontribusi sebesar 56,55% terhadap PDB dan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66% (year-on-year).

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
DKI Jakarta	1.836.240.550	1.792.403.430	1.856.301.410
Jawa Barat	1.490.959.690	1.453.380.720	1.507.746.390
Jawa Tengah	991.516.540	965.225.710	997.317.100
DI Yogyakarta	104.485.460	101.683.520	107.308.560
Jawa Timur	1.649.895.640	1.611.507.780	1.669.116.890
Banten	456.620.030	441.138.980	460.739.580

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Terlihat pada data kontribusi PDRB menunjukkan pesatnya pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang selalu menduduki posisi unggul diantara Provinsi-Provinsi yang ada. Namun masalah pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang ada di Jawa Timur termasuk pembangunan ekonomi di Kawasan Malang Raya masih menjadi masalah yang harus dihadapi dan diperbaiki.

Dalam mengembangkan perekonomian daerah, biasanya strategi yang dilakukan yaitu analisis sektor unggulan. Contohnya seperti penelitian (Hidayah dan Sumanto, 2022) di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa sektor yang berpotensi adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, sektor Industri Pengolahan dinilai sebagai sektor unggulan yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi daerah. (Muljanto, 2018). Namun pada tingkat Provinsi Jawa Timur berdasarkan rata-rata sektor ekonomi dari setiap daerah menunjukkan bahwa sektor potensialnya yaitu sektor Informasi dan sektor Industri Pengolahan. (Mulyanto dan Rachmawati, 2021).

Malang raya merupakan kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur yang mencakup 3 (tiga) daerah yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang

yang memiliki luas sekitar 3.8812,67 km² dan dihuni kurang lebih oleh 3 juta jiwa.

Berikut data luas wilayah dan jumlah penduduk di Malang Raya :

Tabel 1. 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Malang Raya Tahun 2020

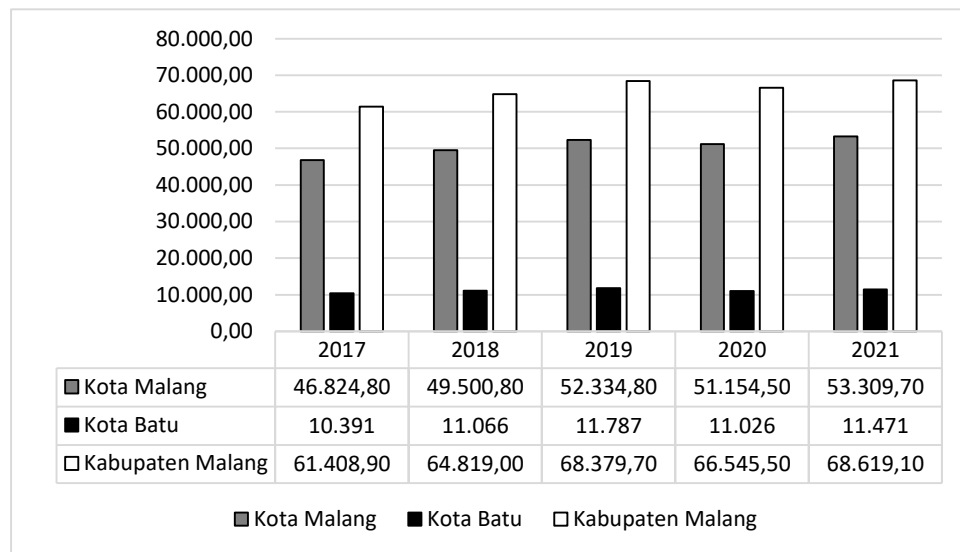
Wilayah	Luas (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (km²)
Kota Malang	145,28	843.810	7.667,00
Kabupaten Malang	3.530,65	2.654.448	892
Kota Batu	136,74	213.046	1.070
Malang Raya	3.812,67	3.711.304	9.629,00

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022)

Pada masa kolonial Belanda, terdapat daerah berbentuk karesidenan yang disebut Malang Raya atau Karesidenan Malang yang merupakan daerah administratif lama Daerah Tingkat 1 yang mencakup 4 kota dan 4 kabupaten yaitu (Kota; Pasuruan, Probolinggo, Batu, Malang) dan (Kabupaten; Malang, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo). Namun kini wilayah Malang Raya hanya meliputi 3 daerah yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang saja.

Kawasan metropolitan Malang yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur menjadikan letak wilayah tersebut cukup strategis dan memiliki potensi ekonomi yang beragam mulai dari wisata ekonomi, wisata alam, dan bidang lainnya. Kondisi ekonomi di ketiga daerah tersebut hampir sama, namun jika dilihat dari kontribusi PDRB tiap-tiap daerah di wilayah ini cukup terlihat perbedaan nilainya. Berikut ini grafik dari data kontribusi PDRB daerah di kawasan Malang Raya :

Tabel 1. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah), Periode Tahun 2017-2021



Sumber: (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022)

Malang Raya dinilai sebagai salah satu daerah dengan sumbangan PDRB tersebar di Provinsi Jawa Timur. Ketiga area di kawasan ini saling bersinergi dan berkaitan satu sama lain untuk mengembangkan potensi yang ada, diantaranya Kota Malang yang dikenal sebagai kota satelit dan juga menjadi tempat berdirinya beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dengan perdagangan dan penduduk yang relatif besar ini banyak melakukan kegiatan ekonomi yang juga mempengaruhi wilayah administratif Kota Batu sebagai pusat destinasi wisata di Jawa Timur dan Kabupaten Malang dengan pesona wisata alamnya yang indah seperti pesisir pantai dan pegunungan yang sejuk. Sehingga pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi sangat erat dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah perlu mengupayakan secara optimal dengan lebih memperhatikan peluang dari sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendorong perekonomian dengan kondisi lapangan yang ada. Untuk dapat mengetahui identifikasi dari sektor-sektor berpotensi yang

ada di area Malang Raya diperlukan penelitian sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan agar setiap ketetapan pembangunan yang akan dijalankan sesuai dan tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Malang Raya yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Sektor Basis dan Non Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Malang Raya dengan Metode Location Quotient, Dynamic LQ, Shift Share, dan Tipologi Klassen**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor-sektor apa saja yang tergolong sektor basis dan sektor non basis di wilayah Malang Raya?
2. Apakah terdapat pergeseran kondisi sektor ekonomi di wilayah Malang Raya?
3. Menganalisis bagaimana kemajuan sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah Malang Raya?
4. Bagaimana pengelompokan tingkatan sektor di wilayah Malang Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor-sektor yang tergolong sebagai sektor basis dan sektor non basis di wilayah Malang Raya.
2. Untuk mengetahui pergeseran kondisi sektor ekonomi di wilayah Malang Raya.
3. Untuk mengetahui perbandingan kemajuan sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah Malang Raya.
4. Untuk mengetahui pengelompokan tingkatan sektor ekonomi di wilayah Malang Raya.

1.4 Ruang Lingkup

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka terdapat batasan permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih lanjut yaitu meliputi indikator sektor yang tergolong sebagai sektor basis dan sektor tidak basis, serta kontribusi suatu sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Malang Raya dengan mengambil data tahun 2017-2021 yang akan diolah menggunakan metode Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat menjadi sumber wawasan bagi pembaca mengenai sektor basis dan sektor non basis, pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi, serta perbandingan kemajuan tiap sektor.
2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor dengan sumber daya yang tersedia.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain agar dapat melengkapi dan mengembangkan kekurangan yang ada pada topik ini dan disempurnakan dalam penelitian selanjutnya.